

SOSIALISASI TENTANG JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BAGI MASYARAKAT DUSUN BUJET, JAMBEWANGI

Socialization On National Health Insurance For The Community Of Bujet Village, Jambewangi

Oktaviani Riga Setyaningrum, Imram Radne Rimba Putri, Choirul Anwar

Departemen Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Alma Ata
Yogyakarta

Korespondensi: Imram Radne Rimba Putri, email : imramradne@almaata.ac.id

ABSTRAK

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam bentuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program layanan unik yang akan menawarkan rangkaian lengkap layanan kesehatan tanpa batas biaya jaminan yang menyertai asuransi. Namun warga Dusun Bujet, Desa Jambewangi, Kec Pakis, Kab Magelang belum memiliki akses terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meningkatnya pemahaman dan kesadaran akan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kalangan warga Dusun Bujet, Desa Jambewangi, Kec Pakis, Kab Magelang menjadi tujuan dari program masyarakat ini. Teknik yang dilakukan meliputi ceramah dengan menggunakan presentasi power point, angket, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Hasil dari kegiatan masyarakat ini memberikan dampak yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Dusun Bujet, Desa Jambewangi, Kec Pakis, Kab Magelang, karena masyarakat semakin percaya diri dan semangat untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Hal ini dimaksudkan agar warga merasa termotivasi untuk segera mendaftarkan diri dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kata Kunci: *Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sosialisasi*

ABSTRACT

National Health Insurance is mandatory for all Indonesian citizens. In the form of Health and Employment BPJS, National Health Insurance is a unique service program that will offer a full range of health services without any guarantee fee limits that accompany the insurance. However, the residents of of Bujet Hamlet, Jambewangi Village, Pakis District, Magelang Regency do not yet have access to National Health Insurance. Increasing understanding and awareness of National Health Insurance among residents of Bujet Hamlet, Jambewangi Village, Pakis District, Magelang Regency is the goal of this community program. The techniques used include lectures using power point presentations, questionnaires, group discussions, and questions and answers. The results of this community activity have a very beneficial impact on the people of of Bujet Hamlet, Jambewangi Village, Pakis District, Magelang Regency, because the community is increasingly confident and enthusiastic to follow government recommendations to get health insurance. This is intended so that residents feel motivated to immediately enroll in the National Health Insurance program.

Keywords: *National Health Insurance, socialization*

PENDAHULUAN

Setiap orang harus memiliki kesehatan yang baik agar dapat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi bugar secara fisik, intelektual, spiritual, dan sosial memungkinkan setiap orang untuk menikmati kehidupan yang memuaskan yang produktif secara sosial dan ekonomi. Salah satu tujuan utama dari proyek pembangunan pemerintah adalah kesehatan. Kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif adalah bagian dari inisiatif perawatan kesehatan ini (Sutanta, 2016). Maka dari itu, diperlukannya jaminan sosial bagi suatu Negara guna meningkatkan kualitas hidup warga atau meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu programnya adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sejumlah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, antara lain Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), serta Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan PT Askes (Persero) bertanggungjawab untuk menyelenggarakan SJSN sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004 (Rohmatullailah, et al., 2021).

Selama 4 tahun terakhir, Indonesia menjadi salah satu negara yang berkembang. Dari Januari

2014 hingga 2019, terdapat peningkatan jumlah keanggotaan JKN, tetapi belum memenuhi target cakupan keanggotaan global atau nasional 100%. Dalam bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan, JKN adalah program layanan unik yang akan menawarkan berbagai layanan kesehatan tanpa batasan biaya yang dijamin dengan asuransi. Tujuan adanya JKN adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. Ada 3 alasan masyarakat harus menjadi peserta JKN, yaitu perlindungan, gotong royong, dan kepatuhan. Pertama, JKN memberikan perlindungan baik untuk diri sendiri, keluarga maupun orang lain untuk mendapatkan kepastian jaminan kesehatan sehingga diharapkan bisa meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Kedua, dengan menjadi peserta JKN, maka setiap peserta yang sehat akan bergotong royong membantu peserta yang sakit. Ketiga, wujud kepatuhan dari setiap Warga Negara Indonesia terhadap perundang-undangan berupa registrasi diri dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN serta mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan berusaha mempromosikan pencapaian

100% *Universal Health Coverage* (UHC) pada tahun 2019. Beberapa bulan menjelang akhir 2019, beberapa daerah di Indonesia telah mencapai target 100% kesehatan nasional keanggotaan asuransi. Terdapat enam dari 34 provinsi di Indonesia telah mencapai angka di atas 95% untuk cakupan program JKN, termasuk Aceh (109,5%), DKI Jakarta (165,45%), Sulawesi Utara (100,71%), Gorontalo (106,96%), Papua (114,14%) dan Papua Barat (139,76%). Sedangkan, beberapa provinsi lain masih berusaha mencapai target (Yosalli & Hafidz As Shidieq, 2020).

BPJS adalah badan hukum yang mengelola program jaminan kesehatan untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk orang asing yang telah bekerja di Indonesia selama minimal enam bulan. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 adalah dua sisi dari BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 5. BPJS Kesehatan diluncurkan pada 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan dimulai pada Juli 2015. Hanya program jaminan kesehatan, yang meliputi rawat inap, pelayanan kesehatan rujukan lanjutan, dan pengobatan tingkat pertama, dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan mengawal koordinasi program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan hari tua (Sanitya Pambudi, 2019). Satu hal yang sama, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sama-sama memungut iuran dari pekerja Indonesia dan masyarakat umum.

Meski sudah menjadi persyaratan pemerintah agar semua orang ikut JKN, namun tidak semua masyarakat Indonesia melakukannya, termasuk warga Dusun Bujet, Desa Jambewangi, Kec Pakis, Kab Magelang. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya mengikuti sosialisasi terkait JKN sehingga pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi peserta JKN itu masih kurang (Mustikasari, 2021). Masyarakat yang memiliki pemahaman yang kuat tentang JKN dan didukung oleh dana yang cukup seringkali merupakan pihak yang menganggap bijaksana untuk mendaftar kepesertaan JKN. Sementara itu, individu yang tidak memiliki dukungan keuangan yang memadai dan tidak mengetahui JKN cenderung mempertimbangkan untuk mendaftar (Syahda, et al., 2022).

Menurut penelitian Situmorang M (2020) tentang Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait

Partisipasi Acara JKN di Gedung Serba Guna Riau Kelurahan Tanjung Riau, hasil pengabdian kepada masyarakat tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat khususnya di Kelurahan Tanjung Riau, karena bertambahnya pengetahuan dan informasi. Jika informasinya akurat, masyarakat merasa aman dan termotivasi untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk memiliki jaminan kesehatan.

TUJUAN DAN MANFAAT

Mensosialisasikan kepada warga Dusun Bujet, Desa Jambewangi, Kec Pakis, Kab Magelang secara menyeluruh tentang JKN sehingga pengetahuan yang dimiliki warga Dusun Bujet lebih meningkat dan tergerak untuk segera mendaftarkan diri sebagai peserta agar dapat memanfaatkan program layanan JKN.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah terlebih dahulu melakukan survey mengenai kepemilikan JKN, setelah itu disusun program berupa sosialisasi JKN bagi Masyarakat di Dusun Bujet yang dilaksanakan secara luring. pada tanggal 3 Desember 2022, dengan demografi utama peserta adalah peserta pengajian yang berjumlah 20 orang. Setelah itu dilakukan ceramah dengan bantuan media berupa powerpoint, kuesioner dan adanya sesi diskusi

serta tanya jawab. Pembagian kuesioner ini untuk mengukur pengetahuan masyarakat sebelum dan sesudah dilakukannya sosialisasi.

HASIL DAN DISKUSI

Sosialisasi tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Masyarakat Dusun Bujet, Jambewangi pada tanggal 3 Desember 2022 dihadiri sebanyak 20 orang peserta pengajian. Lokasi pelaksanaan sosialisasi ini bertempat di rumah warga Dusun Bujet, Jambewangi. Ternyata meski JKN sudah berjalan kurang lebih sembilan tahun, jangka waktu tersebut bukanlah tolok ukur keberhasilan atau tanda bahwa semua orang mengetahui program tersebut, hal ini serupa dengan kondisi yang ditemukan pada masyarakat Dusun Bujet, Desa Jambewangi, Kec Pakis, Kab Magelang (Situmorang, et al., 2020). Sebelum diadakannya penyuluhan, dilakukan terlebih dahulu pengumpulan data informasi di lapangan melalui wawancara singkat untuk mengetahui gambaran kepemilikan JKN di Dusun Bujet, Jambewangi Pakis Kab Magelang. Berdasarkan temuan, masih banyak penduduk yang tidak memiliki kartu dan tidak ikut serta dalam JKN karena tidak mengetahui pentingnya JKN. Warga lain mengaku iurannya terlalu mahal, tidak punya ponsel, daerahnya terpencil, atau terlalu sibuk bekerja di ladang. Apabila

warga sakit ringan, warga hanya melakukan pengobatan sendiri dan membeli obat di apotek saja.



Gambar 1. Foto Bersama Ibu-Ibu Pengajian Dusun Bujet

Berdasarkan temuan tersebut, kami menyusun jadwal kegiatan pengabdian masyarakat untuk memberikan sosialisasi tentang JKN kepada masyarakat Dusun Bujet, Desa Jambewangi, Kec Pakis, Kab Magelang. Dalam sosialisasi warga, topik yang dibahas adalah apa itu JKN; kapan program JKN dilaksanakan; apa itu BPJS; apakah perorangan boleh tidak mendaftar BPJS; apa manfaat BPJS Kesehatan; bagaimana alur pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan; dan berapa besaran iuran yang harus dibayarkan oleh peserta BPJS Kesehatan. Respon warga sangat antusias dengan mendengarkan materi sosialisasi tersebut dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait JKN dikarenakan selama ini belum pernah memperoleh sosialisasi tentang JKN dari pihak

manapun. Kegiatan ini diakhiri dengan foto bersama seperti yang terlihat pada gambar.

Hasilnya diperoleh dengan menggunakan data dari 11 orang yang menyelesaikan pre-test dan post-test. Nilai mean atau rata-rata pretest adalah 4,5, sedangkan nilai mean atau mean posttest adalah 10. Hasil P 0,05 pada Tabel 1 menunjukkan bahwa ada perbedaan pengetahuan yang signifikan antara sebelum dan sesudah dilakukannya sosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dapat mengedukasi peserta tentang materi penyuluhan yang diberikan.

Tabel 1. Nilai Rerata Pre Test dan Post Test

	Pre test	Post test
N	11	11
Nilai min	2	8
Nilai max	10	10
Rerata	4,5	10
SD	1,91	,00
Nilai p		0,000

Kesehatan merupakan hak dasar yang dimiliki setiap warga negara Indonesia, sesuai dengan falsafah dasar negara, Pancasila, yang tertuang dalam sila kelima, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Artinya, setiap orang di suatu negara memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam hal memperoleh pelayanan sosial, seperti perawatan kesehatan dan pendidikan, sebagai warga negara (Susanti, 2020). Kesehatan adalah hal yang wajib itu Inisiatif pembangunan pemerintah Indonesia

menempatkan prioritas tinggi pada kesehatan. Tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif merupakan bagian dari inisiatif pelayanan kesehatan. Salah satu prakarsanya adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dijalankan oleh BPJS, yang menawarkan keamanan finansial dan akses yang adil ke perawatan medis sambil mengintegrasikan tujuan yang berfokus pada keluarga ke dalam upaya kesehatan perorangan dan masyarakat (UKP dan UKM).

Menurut UU SJSN, jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan asas asuransi sosial dan pemerataan dengan maksud memberikan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat dan perlindungan pemeliharaan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya karena telah membayar iuran atau dibayar oleh pemerintah kontribusi (Abiyoga, 2017). Prinsip-prinsip jaminan sosial meliputi kerjasama antara si kaya dan si miskin, sehat dan sakit, tua dan muda, serta berisiko tinggi dan berisiko rendah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UU SJSN; bukan terserah Anda apakah Anda berpartisipasi atau tidak; kontribusi sebanding dengan pendapatan atau upah; dan manfaat selain tenaga kerja disertakan. padahal konsep ekuitas yang

dipermasalahan adalah kesetaraan dalam akses pengobatan berdasarkan kebutuhan medis dan jumlah pembayaran. Aksesibilitas finansial layanan sebanding dengan perawatan kesehatan (Suprianto & Mutiarin, 2017).

Dalam rangka meningkatkan kepesertaan JKN-KIS sehingga mencakup seluruh Indonesia pada 1 Januari, BPJS Kesehatan menargetkan peningkatan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan, mendorong keterlibatan masyarakat, dan mendorong kepatuhan kepesertaan 2019. Namun, masih ada tempat dengan jaminan kesehatan yang buruk dibandingkan dengan daerah lain, dan distribusi JKN belum ideal (Aji, et al., 2021). Masih banyak masyarakat yang belum mendaftar kepesertaan JKN-KIS. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan sosialisasi secara gencar kepada masyarakat untuk menyampaikan pentingnya program tersebut. Selain itu, berbagai detail tentang alur layanan kesehatan, pedoman program JKN-KIS terbaru, dan sejumlah inovasi yang dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk mempermudah individu dalam mengakses layanan (Purwanti, et al., 2019). Untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC), seluruh penduduk Indonesia harus terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Oleh karena itu, sangat penting

bagi semua pihak untuk bekerja sama memastikan seluruh penduduk Indonesia terdaftar sebagai peserta kesehatan (Kurniawati & Rachmayanti, 2018).

Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan bukan PBI Jaminan Kesehatan dianggap sebagai peserta Jaminan Kesehatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia, PBI Jaminan Kesehatan peserta adalah mereka yang yang dianggap miskin dan tidak mampu, sedangkan peserta Jaminan Kesehatan Non PBI adalah mereka yang tidak tergolong miskin dan orang tidak mampu. Perbedaan ini tertuang dalam Pasal 101 Tahun 2012 tentang PBI Jaminan Kesehatan. Yang dianggap miskin dan orang yang miskin, seperti pekerja upahan dan keluarganya, pekerja tidak dibayar dan keluarganya, dan penganggur dan keluarganya.

Peserta PBI penerima iuran jaminan kesehatan menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan. Gaji atau upah bulanan bagi mereka yang menerima upah dari instansi pemerintah, seperti PNS, Anggota TNI dan Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-PNS, ditetapkan sebesar 5% (lima persen), dengan

pemberi kerja dan peserta menyumbang tiga persen masing-masing. Sementara itu, pekerja upahan di BUMN, BUMD, dan swasta memberikan kontribusi bulanan sebesar 4%, Pemberi Kerja memberikan kontribusi sebesar 4%, dan Peserta memberikan kontribusi sebesar 0% (nol dan 5%). (Dewi & Sulistyani, 2015).

Satu-satunya organisasi yang menaungi JKN adalah BPJS. Kartu JKN memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan pengobatan gratis di fasilitas yang berafiliasi dengan BPJS, FKTP dan FKRTL. Bergantung pada persyaratan medis, layanan perawatan diberikan secara bertahap. Selain itu, dengan memiliki kartu asuransi kesehatan, Anda dapat berhenti mengkhawatirkan masalah uang jika sakit. Peserta JKN cenderung menghabiskan lebih sedikit untuk perawatan kesehatan daripada individu yang tidak diasuransikan (Tarigan & Suryati, 2017). Selama program JKN ada, setiap warga negara Indonesia akan memiliki akses ke asuransi kesehatan yang komprehensif, memungkinkan mereka untuk hidup sehat dan berbuah.

Aplikasi mobile JKN yang baru saja dirilis BPJS Kesehatan ini bermaksud memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peserta secara efektif dan efisien. Awalnya, satu-satunya cara

untuk mengakses aplikasi ini adalah dengan mengantre panjang di kantor cabang BPJS Kesehatan. Namun kini layanan yang sangat krusial ditawarkan kepada masyarakat baik secara konvensional maupun online. Melalui aplikasi mobile JKN yang dapat diunduh langsung dari *play store* atau *app store smartphone*, BPJS Kesehatan menawarkan layanan yang mudah. Kemudahan penggunaan aplikasi mobile JKN, antara lain kemampuan membayar iuran, *update* informasi kepesertaan, akses informasi kepesertaan keluarga, pemindahan pasien antara FKTP dan FKRTL, dan memudahkan masyarakat menyampaikan saran atau keluhan (Rinjani & Sari, 2022).



Gambar 2. Penjelasan Materi

Setelah diberikan sosialisasi, peserta memberikan pertanyaan seputar materi. Mereka menanyakan “Apakah tarif iuran dibayarkan setiap bulan?” (warga 1) dan “Apakah fasilitas pelayanan per kelas itu sama saja?” (warga 2).

Hasil pasca kegiatan sosialisasi dapat diketahui antusiasnya respon warga Dusun Bujet untuk mendengarkan materi, mampu memberikan pertanyaan dan menyampaikan kendala keikutsertaan mereka dalam program JKN. Hampir seluruh warga di Dusun Bujet bekerja sebagai pekerja sektor informal seperti petani. Petani yang merupakan pekerja yang diasuransikan seharusnya mengetahui manfaat JKN, namun mayoritas dari mereka cenderung menunda untuk mendaftar. Biasanya, elemen terkait pengetahuan dan pendidikan berdampak pada cara mereka berpartisipasi. Kepribadian seseorang dalam berpendapat, berpikir, dan bersikap dalam melakukan tindakan, termasuk mempersiapkan kesehatan keluarganya dengan berpegang pada JKN, akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Dengan memiliki BPJS, masyarakat telah mampu melakukan tindakan preventif terhadap risiko sakit dengan kerelaan membayar iuran yang sudah ditetapkan (Siswoyo, et al., 2015).

Selain itu, hambatan terbesar untuk memperoleh asuransi kesehatan bagi banyak pekerja sektor informal adalah gaji mereka yang rendah (Carrin et al, 2005). Posisi ekonomi yang rendah, menurut Intiasari et al. (2015), dapat menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak

mengetahui perlunya melakukan pembayaran asuransi kesehatan bahkan tidak mengetahui apa itu asuransi kesehatan. Gaji yang rendah menghambat akses ke pendidikan, makanan sehat, perumahan yang layak, dan layanan kesehatan berkualitas tinggi (Satriawan, et al., 2021). Makanya, besaran iuran/premi dan jumlah anggota keluarga juga menjadi dasar seseorang sebelum memilih kepesertaan mandiri. Bagi peserta yang bukan PBI tentu harus mengeluarkan biaya sendiri untuk membayar iuran setiap bulannya (Pangestika, et al., 2017).

Bank yang telah bermitra dengan BPJS Kesehatan wajib menerima donasi paling lambat tanggal sepuluh setiap bulannya. Premi asuransi kesehatan peserta akan diganti dengan tarif yang memenuhi semua peraturan dan UU yang berlaku. Kontribusi peserta dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan aturan yang mengaturnya. Calon peserta dapat melakukan pembayaran bulanan BPJS Kesehatan di berbagai lokasi antara lain ATM Bank, Minimarket/Alfamart dan Indomart, Kantor Pos, Bank Autodebit, dan SMS Banking (Semaun & Juneda, 2018).

Kelompok pekerja sektor informal lainnya mengikuti JKN dengan alasan sebagai berikut: Tidak sehat, jadwal kerja padat, tempat tinggal

jauh, dan tidak memiliki telepon genggam. Di Dusun Bujet, Desa Jambewangi, Kec Pakis, Kab Magelang, kurangnya informasi juga ditengarai menjadi salah satu penyebab masih banyaknya warga yang tidak ikut BPJS. Jadi, tenaga kesehatan, BPJS, dan kader harus mengambil pendekatan proaktif sambil memberikan informasi atau sosialisasi yang jelas dan meyakinkan untuk meyakinkan individu untuk mendaftar program JKN untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka sesegera mungkin (Subkhan, 2018).

SIMPULAN DAN SARAN

Sosialisasi tentang JKN mampu merubah pengetahuan masyarakat Dusun Bujet, Desa Jambewangi, Kec Pakis, Kab Magelang mengenai JKN sehingga masyarakat dapat lebih memahami. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan nilai pada post-test dibandingkan dengan pre-test.

Dengan diberikannya sosialisasi, diharapkan masyarakat menjadi tergerak untuk segera memproses dan mendaftarkan diri menjadi peserta JKN. Sosialisasi terkait JKN dari beberapa instansi terkait seperti BPJS, Puskesmas, Kelurahan ataupun Kader juga perlu

ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami program JKN.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada warga Dusun Bujet, Desa Jambewangi, Kec Pakis, Kab Magelang, dan teman-teman lainnya atas bantuan dan dukungannya dalam menyukseskan proyek pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Siswoyo, B. E., Prabandari, Y. S. & Hendrartini, Y., 2015. Kesadaran Pekerja Sektor Informal terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia:JKKI*, 4(4), pp. 118-125.
- Abiyoga, H., 2017. Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Pada Pekerja Gardena Department Store dan Supermarket di Kota Yogyakarta. *Jurnal Universitas Atma Jaya*.
- Aji, D. A. S., Munir, D. M. A. B. & Ariftiyana, S., 2021. *Health Improvement Strategies Within and Post COVID-19 Pandemic*. Asia Pacific Partnership On Health And Nutrition Improvement (APHNI) 2021 penyunt. Yogyakarta: Alma Ata University Press.
- Dewi, M. W. & Sulistyani, D., 2015. Perbandingan Premi Asuransi Kesehatan Peserta BPJS Badan Usaha Dengan Asuransi Kesehatan Swasta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 16(01).
- Kurniawati, W. & Rachmayanti, R. D., 2018. Identifikasi Penyebab Rendahnya Kepesertaan JKN Pada Pekerja Sektor Informal di Kawasan Pedesaan. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 6(1), pp. 33-39.
- Mustikasari, A. P., 2021. BPJS Kesehatan Memberikan Jaminan Kesehatan Terhadap Pasien Atau Masyarakat. *Yustitiabelen*, 7(2), pp. 146-154.
- Pangestika, V. F., Jati, S. P. & Sriatmi, A., 2017. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepesertaan Sektor Informal Dalam BPJS Kesehatan Mandiri di Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(3), pp. 39-49.
- Purwanti, S., Diaty, R. & Laily, R., 2019. Sosialisasi Pemanfaatan Layanan Digital Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Puskesmas Banjarmasin Indah. *AbdiCurio Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), pp. 24-29.
- Rinjani, R. & Sari, N., 2022. Analisis Penerapan Aplikasi Mobile Jkn Terhadap Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Subulussalam. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), pp. 209-223.
- Rohmatullailah, D. et al., 2021. Peningkatan Pengetahuan tentang JKN dengan Sosialisasi dan Pembentukan Kader JKN Kota Bogor. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat (Pengmaskemas)*, 1(2), pp. 110-118.
- Sanitya Pambudi, L., 2019. Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker nomor 1 Tahun 2016. *Indonesian State Law Review*, 1(2), pp. 205-228.
- Satriawan, D., Pitoyo, A. J. & Giyarsih, S. R., 2021. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepemilikan Jaminan Kesehatan Pekerja Sektor Informal di Indonesia. *Jurnal Tataloka*, 23(2), pp. 263-280.
- Semaun, S. & Juneda, 2018. Sistem Pengelolaan Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Mandiri Kota Pare-Pare. *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 16(2), pp. 284-306.
- Situmorang, M., Retno & Widya, 2020. Sosialisasi pada masyarakat tentang keikutsertaan dalam jaminan kesehatan nasional di gedung serba guna riau

- kelurahan Tanjung Riau. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), pp. 125-131.
- Subkhan, F., 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. *Jurnal Economicus*, 12(2), pp. 124-135.
- Suprianto, A. & Mutiarin, D., 2017. Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. *Journal of Governance And Public Policy*, 4(1).
- Susanti, F., 2020. Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan) Di Kota Magelang. *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*, 1(2).
- Sutanta, 2016. Persepsi Masyarakat Yang Tidak Menjadi Anggota Jaminan Kesehatan Nasional Terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional. *Jurnal Kesehatan Nasional. Jurnal Kesehatan Samodra Ilmu*, 7(1).
- Syahda, S., Lubis, E. M., Atika, R. & Gurning, F. P., 2022. Hubungan Pengetahuan Dengan Keikutsertaan Masyarakat Dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). *HUMANTECH : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(9), pp. 1202-1209.
- Tarigan, I. & Suryati, T., 2017. Gambaran Out of Pocket pada Awal Era JKN di Indonesia Description Out of Pocket in the Early Era JKN at Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 1(2), pp. 141-146.
- Yosalli & Hafidz As Shidieq, F., 2020. Faktor yang Mempengaruhi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 23(04), pp. 133-139.